

## EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOYOLALI

Alvon Binazier Tabarani<sup>1</sup>; Adji Mas Suryo Prakoso<sup>2</sup> Chandra Maulana Zulfikar<sup>3</sup>; Kadek  
Mega Satria<sup>4</sup>; Muhammad Reza Ijazi<sup>5</sup>; Dani Fitria Brilianti<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Teknologi Otomotif, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal,  
Indonesia

<sup>6</sup>Dosen Program Studi Teknologi Otomotif, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan,  
Tegal, Indonesia

\*Corresponding Author: binazieralvon@gmail.com

### Abstract

*This study evaluates the implementation of administrative service standards and technical vehicle inspections at the Boyolali Regency Transportation Department. The integrated SIM PKB system has been adopted to enhance service efficiency, yet operational challenges remain, including reliance on manual systems, network instability, and congestion during peak hours. Observations were conducted on the inspection process, covering vehicle physical checks and technical feasibility based on existing regulations. The findings indicate that renewal testing dominates at 79%, while initial testing remains relatively low. The evaluation also highlights the necessity of service digitalization and workforce capacity improvements to minimize administrative errors and enhance service accountability. Strategic recommendations include the development of an online platform for administrative processes, optimization of occupational safety policies, and increased public outreach to raise awareness of periodic vehicle inspections.*

*Keywords: vehicle inspection, SIM PKB, service standards, digitalization, service accountability*

### Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi penerapan standar pelayanan administrasi dan pengujian teknis kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali. Sistem terintegrasi berbasis SIM PKB telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi layanan, namun masih terdapat kendala operasional seperti ketergantungan pada sistem manual, ketidakstabilan jaringan, dan kepadatan antrean pada jam sibuk. Observasi dilakukan terhadap proses pengujian yang mencakup pemeriksaan fisik kendaraan dan kelayakan teknis berdasarkan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji perpanjangan mendominasi dengan persentase 79%, sementara uji pertama relatif rendah. Evaluasi juga mengidentifikasi perlunya digitalisasi layanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna meminimalkan kesalahan administratif serta meningkatkan akuntabilitas layanan. Rekomendasi strategis meliputi pengembangan platform daring untuk administrasi, optimalisasi kebijakan keselamatan kerja, serta peningkatan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya uji berkala kendaraan.

Kata Kunci: Pengujian kendaraan bermotor, SIM PKB, standar pelayanan, digitalisasi, akuntabilitas layanan

## PENDAHULUAN

Perkembangan pada teknologi transportasi telah mengubah pola mobilitas masyarakat secara signifikan (Februara et al., 2024). Transisi dari sarana transportasi tradisional ke kendaraan bermotor modern menuntut sistem pengawasan yang ketat terhadap kelayakan teknis kendaraan (Roberth Nanlohy & Samangun, 2025; Subhan et al., 2024). Hal ini penting untuk

menjamin keselamatan pengguna jalan dan mengurangi dampak lingkungan dari operasional kendaraan bermotor(Nisak & Febrian, 2025; N. A. Rahmawati & Bachtiar, 2018).

Di Indonesia, sistem pengujian kendaraan bermotor terdiri atas Uji Tipe dan Uji Berkala(Saputra et al., 2021). Uji Tipe dilakukan pada tahap praproduksi untuk memverifikasi kelayakan desain kendaraan, sedangkan Uji Berkala merupakan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang sudah beroperasi(Kurniawan & Indrayana, 2023; Palis et al., 2024). Kedua sistem ini diatur dalam peraturan Kementerian Perhubungan (2015) sebagai upaya menjaga standar keselamatan transportasi darat(Kementerian Perhubungan, 2015).

Kendaraan Wajib Uji (KBWU) diwajibkan menjalani pemeriksaan teknis setiap enam bulan sekali(Atik, 2022; Malau, 2024). Proses ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik, kinerja komponen, dan aspek keselamatan kendaraan(Erik Zubair Rohman & Surya Editya, 2025). Efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten (Kementerian Perhubungan, 2018).

Kabupaten Boyolali sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas transportasi yang padat membutuhkan sistem pengujian kendaraan yang efektif. Dinas Perhubungan setempat melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggung jawab melaksanakan pengujian berkala ini. Namun, implementasi standar pelayanan administrasi dan teknis di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala operasional.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi penerapan standar pelayanan administrasi dan pengujian teknis kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi tantangan dalam penerapan standar pelayanan. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengujian kendaraan bermotor, khususnya dalam aspek administrasi dan teknis

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan standar pelayanan administrasi dan teknis pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali(Pratiwi et al., 2021). Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses pengujian kendaraan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi tahapan administrasi, pemeriksaan fisik, dan uji fungsi komponen(Fitra, 2020).

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi Partisipatif**

peneliti terlibat langsung dalam proses pengujian untuk mendokumentasikan prosedur kerja, interaksi petugas dengan pengguna layanan, serta kendala operasional(Hermawan et al.,

2024).

## 2. Dokumentasi

berupa foto dan catatan lapangan yang merekam kondisi fasilitas pengujian, kelengkapan peralatan, dan kepatuhan terhadap SOP.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Reduksi Data

dengan mengklasifikasikan temuan ke dalam aspek administrasi (waktu layanan, kelengkapan berkas) dan teknis (kepatuhan standar pengujian)(Theresia et al., 2022).

#### 2. Penyajian Data

dalam bentuk tabel dan deskripsi naratif untuk membandingkan praktik lapangan dengan regulasi Permenhub No. 33/2018.

#### 3. Verifikasi

dengan triangulasi melalui wawancara informal kepada petugas guna memvalidasi temuan observasi(Rifa'i, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali telah menerapkan sistem terintegrasi berbasis Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB) yang menghubungkan seluruh proses administrasi dan teknis. Berdasarkan observasi, pelayanan dibagi menjadi beberapa jenis dengan persyaratan spesifik disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

| Standar   | Uraian                | Indikator                                                                                                                                     | Kondisi Lapangan                                                                                                                                                | Kesesuaian                                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Standar 1 | Motto, Visi, dan Misi | Terdapatnya visi dan misi yang diterapkan mengacu pada pasal 2 Permenhub Nomor PM 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Mengacu pada pasal 2 yaitu menjamin keselamatan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan akibat kendaraan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |

|           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                               | Penetapan moto pelayanan yang dapat memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat                      | Seluruh pegawai dapat memahami dan termotivasi pada saat melaksanakan pengujian                | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
|           |                                                                                                                                                                               | Informasi Moto Pelayanan                                                                                                              | Diumumkan melalui media inforasi                                                               | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
| Standar 2 | Standar Pelayanan(Komitmen Pelayanan)                                                                                                                                         | Publikasi komitmen pelayanan                                                                                                          | Diumumkan melalui media informasi (spanduk, banner, display, papan informasi atau bentuk lain) | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
| Standar 3 | Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan (tata cara pelayanan pengujian kendaraan bermotor, tata cara pengoperasian alat uji, dan tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan) | Tata cara pelayanan pengujian kendaraan berpedoman pada Permenhub Nomor PM 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Sudah Sesuai                                                                                   | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
|           |                                                                                                                                                                               | Tata cara pengoperasian alat uji                                                                                                      | Mengacu pada intruksi kerja alat sesuai dengan spesifikasi alat yang dimiliki                  | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
|           |                                                                                                                                                                               | Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor mengacu pada pasal 11 s/d 13 Permenhub Nomor PM 113 Tahun 2015 Tentang Pengujian   | Sudah Sesuai                                                                                   | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |

|           |                                                | Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor                                              |                                                                                                  |                                            |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Standar 4 | Penanganan Pengaduan                           | Sistem atau prosedur penanganan pengaduan                                     | Tersedia penanganan pengaduan (formulir cetak elektronik) dan tindak lanjut penanganan pengaduan | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
| Standar 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)               | Pelaksanaan survey IKM terkait komitmen pelayanan                             | Dilaksanakan                                                                                     | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
| Standar 6 | Papan informasi/media informasi                | Mengacu pada pasal 4 ayat (8) huruf a Perdirjen Perhubungan Darat             | Sudah Sesuai                                                                                     | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
| Standar 7 | Rencana dan pelaporan kepada Direktur Jenderal | Membuat pelaporan secara berkala menggunakan sistem yang terintegrasi (BLU-e) | Dilaksanakan                                                                                     | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |

Pelayanan berlangsung mulai dari pendaftaran di loket, verifikasi dokumen, pembayaran, hingga pengujian teknis (T. Rahmawati, 2022). Rata-rata waktu pengujian mencapai 24 menit, dengan pemeriksaan emisi sebagai tahap paling efisien yaitu 2 menit, sementara brake tester membutuhkan waktu paling lama, yakni 3 menit.

**Tabel 2.** Durasi Tahapan Pengujian Kendaraan Bermotor

| No | Jenis Pengujian                                             | Durasi  |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Pendaftataran ( verifikasi berkas pemohon )                 | 3 Menit |
| 2  | Pra Uji/ Pemeriksaan Identitas Kendaraan/ Pemeriksaan Fisik | 2 Menit |
| 3  | Pemeriksaan Emisi Gas Buang                                 | 2 Menit |
| 4  | Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan                          | 2 Menit |
| 5  | Uji Kedalaman Alur Ban                                      | 1 Menit |
| 6  | Uji <i>Side Slip Tester</i>                                 | 1 Menit |
| 7  | Pemeriksaan Lampu- Lampu                                    | 2 Menit |
| 8  | Uji Suara Klakson                                           | 1 Menit |
| 9  | Pemeriksaan <i>Speedometer Tester</i>                       | 2 Menit |
| 10 | Penimbangan/ <i>Axleload Meter</i>                          | 1 Menit |

|    |                                                   |          |
|----|---------------------------------------------------|----------|
| 11 | Pemeriksaan <i>Brake Tester</i>                   | 3 Menit  |
| 12 | Analisis dan Penetapan Hasil Uji                  | 1 Menit  |
| 13 | Cetak Bukti Lulus Uji ( Kartu Uji dan Tanda Uji ) | 1 Menit  |
| 14 | Penyerahan Bukti Lulus Uji                        | 30 Detik |
| 15 | Total Waktu Uji                                   | 24 Menit |

Kendala utama mencakup gangguan jaringan yang menghambat integrasi data SIM PKB serta kepadatan antrean pada jam sibuk, khususnya antara pukul 08.00 hingga 10.00, dengan hari Jumat sebagai waktu paling padat.

### Kinerja Pengujian Berkala

Menurut data, uji perpanjangan mendominasi dengan 79%, jauh lebih tinggi dibandingkan uji pertama yang hanya 3%, mutasi sebesar 4%, dan numpang uji sebanyak 14%. Aktivitas tertinggi tercatat pada April 2025, dengan kunjungan mencapai 401 kendaraan.

**Tabel 3.** Data KBWU

| UJI KBWU                 | Bulan |       |     | Persentase (%) |
|--------------------------|-------|-------|-----|----------------|
|                          | Maret | April | Mei |                |
| Uji Berkala Pertama      | 16    | 12    | 12  | 3%             |
| Uji Berkala Perpanjangan | 245   | 379   | 302 | 79%            |
| Mutasi Masuk             | 2     | 10    | 7   | 2%             |
| Mutasi Keluar            | -     | -     | 7   | 2%             |
| Numpang Uji Masuk        | -     | -     | 18  | 5%             |
| Numpang Uji Keluar       | -     | -     | 34  | 9%             |
| Jumlah                   | 263   | 401   | 380 | 100%           |

Tingginya jumlah uji perpanjangan mencerminkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap aturan berkala, sementara rendahnya angka uji pertama menunjukkan bahwa hanya sedikit kendaraan baru yang beroperasi di wilayah tersebut.

### Pemeriksaan Teknis dan Kelaikan Kendaraan

Pemeriksaan teknis didasarkan pada Permenhub No. 19/2021 (Kementerian Perhubungan, 2021) dan dilakukan menggunakan 11 alat uji yang telah dikalibrasi disajikan Tabel 4.

**Tabel 4.** Kesesuaian Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

| Standar   | Uraian              | Indikator                                        | Kondisi Lapangan | Kesesuaian                                 |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Standar 1 | Lokasi              | PP No. 55 Tahun 2012 Pasal 162 Tentang Kendaraan | Sudah Sesuai     | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
| Standar 2 | Fasilitas Pengujian | Permenhub No. PM 19 Tahun 2021                   | Sudah Sesuai     | Sesuai dengan SOP KP.4404                  |

|           |                     |                                                                                     |                                            |                                            |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |                     | Pasal 48 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                               |                                            | AJ.502 DRJD 2020                           |
| Standar 3 | Peralatan Pengujian | Permenhub No. PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor        | 11 Alat Lengkap                            | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
|           |                     | Berfungsinya Peralatan                                                              | 11 alat berfungsi                          | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
|           |                     | Teknologi Peralatan                                                                 | Sistem Komputerisasi                       | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
| Standar 4 | Kalibrasi           | Surat Keterangan hasil Kalibrasi/Berita Acara dengan hasil akurat dan masih berlaku | 11 alat terkalibrasi                       | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
| Standar 5 | Kompetensi Penguji  | Memiliki tenaga penguji yang berkompeten dengan dibuktikan sertifikat kompetensi    | Sudah Sesuai                               | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
| Standar 6 | Sistem Informasi    | Sistem Informasi Terintegrasi                                                       | Sistem informasi terintegrasi dengan pusat | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |

|            |                       |                                                      |                                                                                                  |                                            |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Standar 7  | Tanda Bukti Lulus Uji | Sudah menggunakan Bukti Lulus Uji elektronik (BLU-e) | Sipelihara secara periodik dan dapat digunakan selama 3 tahun atau 6 kali melaksanakan pengujian | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |
| Standar 18 | Kapasitas Uji         | Kapasitas uji perhari                                | Sudah sesuai                                                                                     | Sesuai dengan SOP KP.4404 AJ.502 DRJD 2020 |

---

Prosedur pemeriksaan mencakup verifikasi identitas kendaraan untuk memastikan kesesuaian nomor rangka dengan dokumen, serta pemeriksaan fisik yang meliputi beberapa aspek. Bagian depan diperiksa untuk kondisi lampu dan klakson, samping mencakup ban serta spion, belakang mencakup lampu belakang, sementara bagian dalam diperiksa untuk memastikan keberadaan dan kondisi APAR serta sabuk pengaman.

### **Analisis Integritas Sistem**

Pelayanan di Boyolali telah memenuhi 7 standar administrasi dan 8 standar teknis, mencakup kompetensi penguji bersertifikat serta kapasitas uji harian yang memadai. Kendala utama masih terdapat pada ketergantungan sistem manual dalam administrasi awal, yang dapat menyebabkan inefisiensi. Sebagai solusi, disarankan untuk memperkuat infrastruktur IT dan memberikan pelatihan kepada petugas guna mengurangi kesalahan manusia.

### **KESIMPULAN**

Pelayanan administrasi dan pengujian teknis kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali telah memenuhi standar regulasi dengan sistem terintegrasi dan prosedur operasional yang jelas. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada sistem manual, ketidakstabilan jaringan, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih perlu diatasi melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta sosialisasi yang lebih intensif. Sebagai langkah strategis, pengembangan platform daring, penyempurnaan kebijakan K3/SMK3, dan optimalisasi media informasi dapat meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas layanan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Atik, S. (2022). *ANALISIS PENGARUH BIAYA RETRIBUSI, KUALITAS PELAYANAN, DAN LOKASI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA JASA PADA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS ANGKUTAN BARANG DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR*. Universitas Maritim Amni.
- Erik Zubair Rohman, M., & Surya Editya, A. (2025). INVESTIGASI FORENSIK KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN METODE DEEP LEARNING. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(4), 6692–6698. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i4.14170>
- Februara, M. S., Arindri, E., Simamora, I. B., Sihombing, S. M., & Hidayati, D. A. (2024). Perkembangan Transportasi Ojek Online dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi di Bandar Lampung. *SOSIETAS : Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 14(1), 31–42. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v14i1.70447>
- Fitra, A. M. (2020). ANALISIS UJI LAIK FUNGSI JALAN ASPEK TEKNIS PADA RUAS JALAN NASIONAL TAMBU – TOMPE PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Journal of Civil Engineering and Planning*, 1(2), 130. <https://doi.org/10.37253/jcep.v1i2.840>
- Hermawan, P. P., Abdussalaam, F., Sari, I., Program, S., Manajemen, I., Kesehatan, P., Ganesha, K., Bandung, J., Barat, I., Studi, P., Medis, R., Kesehatan, I., Ganesha, P., & Bandung, K. (2024). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Rekam Medis Elektronik Guna Menunjang Tata Kelola Pelaporan Rawat Jalan. In *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi (JIMIK)* (Vol. 5, Issue 3). <https://journal.stmiki.ac.id>
- Kurniawan, B. A., & Indrayana, S. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 DALAM MENUNJANG PENGUJIAN KIR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 631–636. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1974>
- Malau, I. R. (2024). *APLIKASI MANAJEMEN PERAWATAN DAN LAPORAN KERUSAKAN ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR SECARA BERKALA BERBASIS ANDROID DI UPTD PKB KABUPATEN SLEMAN*. POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI.
- Nisak, R. Y., & Febrian, R. A. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Keselamatan Transportasi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(1), 109–118.

- Palis, Y. J., Siswanto, P. W., & Alexander, E. (2024). Perancangan Pembuatan Website Untuk Rental Mobil Pada Toko Cakrawala Trans. *SIMKOM*, 9(1), 67–78.  
<https://doi.org/10.51717/simkom.v9i1.368>
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pub. L. No. 19 (2021).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pub. L. No. 33, Pemerintah Indonesia (2018).
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 144 Tahun 2015 Tentang Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara Online, Pub. L. No. 144 (2015).
- Pratiwi, A., Fadlilatul Hikmah, Adi Apriadi Adiansha, & Suciwati. (2021). Analisis Penerapan Metode Games Education dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *JagoMIPA: Jurnal Pendidikan Matematika Dan IPA*, 1(1), 36–43.  
<https://doi.org/10.53299/jagomipa.v1i1.27>
- Rahmawati, A. P., Wolor, C. W., Negeri, U., Eka, J., & Utari, D. (2025). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Pada PT XLSmart. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 3025–7972. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4656>
- Rahmawati, N. A., & Bachtiar, A. C. (2018). Analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah berdasarkan kebutuhan sistem. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 14(1), 76. <https://doi.org/10.22146/bip.28943>
- Rahmawati, T. (2022). Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Studi Kasus Pelaksanaan PKB Di Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(2), 532–548. <https://doi.org/10.47233/jebis.v2i1.141>
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 31–37. <https://glorespublication.org/index.php/ekodestinasi>
- Roberth Nanlohy, J., & Samangun, C. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Motor Kendaraan Roda Dua di Manokwari. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 811–821.  
<https://doi.org/10.31933/kerj1n24>
- Saputra, D., Arbain, T., & Syafari, M. R. (2021). KUALITAS PELAYANAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI TAMIANG LAYANG KABUPATEN BARITO TIMUR KALIMANTAN TENGAH. *Jurnal PubBis*, 5(1).
- Subhan, A., Ritawaty, N., Nisvie, M. R., & Darmawati, A. (2024). Analisis Kebijakan Overdimensi Kendaraan Uji KIR Terkait Keselamatan Jalan dan Efisiensi Muatan di Hulu Sungai Utara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6).

Theresia, A., Langkai, J., & Kairupan, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MANADO. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 47–62. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.496>